

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan, namun pada hakekatnya pembangunan hanya ditunjukan untuk pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi, bukan peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Artinya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diimbangi dengan tingkat pemerataan distribusi hasil pembangunannya. Jadi, pembangunan ekonomi dinyatakan berhasil apabila suatu negara dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur salah satu aspek yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yaitu derajat pembangunan ekonomi.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pembangunan ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu komponen yang dapat dihitung dari indeks harapan hidup, indeks standar hidup layak dan indeks pendidikan. Didalam perhitungan indeks harapan hidup, indeks standar layak dan indeks pendidikan akan melibatkan komponen ekonomi maupun non ekonomi misalnya kualitas kesehatan, kualitas pendidikan dan kependudukan,

sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah dianggap relevan untuk digunakan sebagai tolak pada dasarnya perekonomian suatu negara akan mengalami perkembangan baik di negara maju maupun negara berkembang. Pendekatan pembangunan bukan hanya menentukan perhitungan dan pertumbuhan ekonominya saja akan tetapi lebih menentukan pembangunan kapasitas manusia.

Didalam ayat Al-Quran dan riwayat tabi'in salah satu yang bisa dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Bahwa pembangunan tidak semata-mata membangun fisik, tetapi juga suatu hal yang bersifat immaterial dan spiritual. Hal ini dapat dibuktikan pada Al-Quran surah Al-A'raaf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS Al-A'Raaf : 96).

Dalam membangun sumber daya manusia dapat diukur dengan menggunakan parameter yang populer saat ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah disetujui oleh dunia melalui *United Nation Development Programe* (UNDP). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia dapat disebabkan karena kurangnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan penduduknya. Melalui Ipm

dapat diketahui perkembangan kualitas sumber daya manusia setiap provinsi di Indonesia. BPS menghitung IPM pada tingkat regional sejak tahun 1996, yaitu provinsi. Tujuan untuk di publikasikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap provinsi adalah untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan kualitas manusianya. Adapun tabel dibawah ini yang menjelaskan tentang bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan di pulau Jawa sebagai berikut:

TABEL 1.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
di Pulau Jawa tahun 2015-2018 (indeks)

Provinsi	2015	2016	2017	2018
Banten	70,27	70,96	71,42	71,95
DKI Jakarta	78,99	79,60	80,06	80,47
Jawa Barat	69,50	70,05	70,69	71,30
Jawa Tengah	69,49	69,98	70,52	71,12
Jawa Timur	68,95	69,74	70,27	70,77
DI Yogyakarta	77,59	78,38	78,89	79,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa dalam Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat lebih unggul diantara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan secara bertahap dalam kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2015-2018 yang pada awalnya sebesar 69,50 indeks dan terus meningkat sampai tahun 2018 hingga 71,30 indeks. Akan tetapi IPM Provinsi Jawa Barat mendapat urutan keempat di pulau jawa.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu alat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meratanya pendapatan masyarakat. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menaikkan produktifitas perekonomian sehingga tingkat pendapatan juga mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan merupakan suatu cerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Paradigma pembangunan yang saat ini sedang berkembang adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dengan pembangunan manusia dan dapat dilihat dengan kualitas hidup manusia disetiap negara. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya sangat membutuhkan modal manusia yang berkualitas agar dapat bisa menjadi modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas pemerintah dapat bisa memberikan fasilitas untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Adapun kualitas SDM dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia dan dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan yaitu pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian dengan cara menerapkan hidup sehat, pembangunan pendidikan dengan cara arah pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang (N. Dewi, Yusuf, & Iyan, 2016).

Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan IPM adalah kurang meratanya distribusi pendapatan. Masyarakat masih memercayai bahwa pendapatan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, yang artinya seseorang harus melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan. Fenomena yang terjadi bukanlah masyarakat enggan untuk bekerja hanya saja sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang menyebabkan masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga akan berdampak terhadap pengangguran yang semakin tinggi (Meydiasari & Soejoto, 2017). Adapun beberapa faktor yang diduga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia antara lain:

Kesenjangan permasalahan upah kaum buruh secara tidak langsung dapat mempengaruhi IPM, permasalahan upah buruh dapat mengakibatkan terhadap masalah kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hanya saja seorang buruh ingin mendapatkan hidup yang layak untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Upah atau gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan dari sebuah perusahaan sebagai konsekuensi dari kedudukan sebagai seorang karyawan. Pada hakekatnya upah merupakan sumber utama penghasilan seseorang. Untuk menetapkan besarnya upah harus memberikan keadilan dan bersifat dinamis sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap karyawan (Ismanti, 2017).

Meningkatnya PDRB akan menganti pola konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang yang berkaitan erat dengan IPM karena adanya daya beli yang termasuk dalam salah satu indikator terhadap IPM yaitu indikator pendapatan. Dengan tingginya produktivitas dan kreativitas maka penduduk dapat mengelola sumber daya yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi (Bhakti, Istiqomah, & Suprpto, 2017). Semakin tinggi PDRB maka akan semakin makmur kesejahteraannya.

Derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup adalah salah satu indikator dari IPM. Angka kesehatan yang tinggi harus disertai dengan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang baik. Untuk pembangunan sanitasi yang baik terdapat 3 (tiga) bidang antara lain pembangunan pengelolaan sampah, pembangunan pengelolaan air limbah dan pembangunan pengelolaan saluran pembuangan. Pembangunan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang layak. Namun di negara berkembang seperti Indonesia pembangunan bidang sanitasi selalu menghadapi kendala pada minimnya pendapatan masyarakat, sehingga akan berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan sanitasi kesehatan (Bhakti et al., 2017).

Hubungan antara pendidikan dengan pembangunan manusia memang sudah banyak terjadi, baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan melakukan cara untuk mengangkat kehormatan bangsa dan meningkatkan kemakmuran rakyat yaitu dengan cara melalui pengembangan pendidikan. Seringkali dipercayai bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan berkaitan positif dengan tingkat penghasilan. Sama dengan kesehatan, pendidikan menjadi salah satu aspek penting untuk mempercepat pembangunan manusia. Dengan berbagai upaya dilakukan untuk mencegah tingginya angka anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi, memperbaiki kualitas dalam pembelajaran, mengembangkan infrastruktur dan sarana sekolah. Perbaikan tidak hanya dengan kuantitas, tetapi juga dengan memperbaiki kualitas dan layanan pendidikan (Rubiyatno, 2012).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, mengenai keterkaitan antara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Akses Sanitasi dan Jumlah sekolah maka peneliti menarik untuk penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka didalam penelitian akan diajukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh Akses Sanitasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten (UMK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat
3. Untuk menganalisis pengaruh Akses Sanitasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat
4. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam mengaplikasikan sebagian teori ekonomi yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan.

2. Bagi peneliatan dengan topik sejenis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan mengembangkan teori-teori yang didapat khususnya mengenai indeks pembangunan manusia.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi mengenai Indeks Pembangunan Manusia.